

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DI BIDANG PERSAMPAHAN DI KOTA DUMAI

Oleh:

Alam Sander Trisnawan

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Syahrul Akmal Latif

Dosen Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: syahrul72@soc.uir.ac.id

Abstrak

Masalah sampah menjadi permasalahan yang krusial untuk wilayah bertataran Kota di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah termasuk masalah pelayanan persampahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan di Kota Dumai ditemukan permasalahan kurangnya efektifitas pelayanan persampahan di wilayah Kecamatan seperti kurang tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi untuk setiap wilayah Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012. Berdasarkan gejala tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012. Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi kebijakan menurut Dunn yang menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (*adequacy*), Pemerataan (*equity*), Responsivitas, Ketepatan (*appropriateness*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%) yang dikategorikan Cukup Baik. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2) Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang (3) Minimnya sarana dan prasarana (4) Masih banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarankan kepada pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan dibidang persampahan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan Walikota dan Persampahan

PENDAHULUAN

Menurut (Manik, 2017) sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Meningkatnya jumlah sampah setiap Tahunnya mendorong pemerintah untuk melakukan suatu upaya agar sampah yang ada tidak menumpuk dan tidak mencemari lingkungan. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam hal ini dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum termasuk bidang persampahan harus terus disediakan untuk mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan kualitas pelayanan yang menjamin kesinambungan pelayanan persampahan itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (DTKPP) Kota Dumai hanya fokus kepada beberapa titik saja dalam masalah pengelolaan sampah. Fokus utama nya hanya pada wilayah perkotaan dan jalan- jalan protokol saja. Beberapa Jalan yang menjadi wilayah kerja DTKPP yaitu; 1) Jl.Jend Sudirman; 2) Jl Sultan Syarif Kasim; 3) Jl. Putri Tujuh; 4) Jl. Soebrantas; 5) Jl. Diponegoro; 6) Jl.Pattimura; 7) Jl. Hasanuddin 8) Jl. Budi Kemuliaan; 9) Jl. Tegalega; 10) Jl. Merdeka; 11) Jl. Bukit Datuk 12) Jl. Cempedak; 13) Jl. Dock Yard; 14) Jl. Kelakap Tujuh; dan 15) Jl. Datuk Laksmana. Beberapa Jalan tersebut menyebar pada Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Untuk lebih jelasnya.

Melihat kondisi diatas dapat diketahui bahwa masalah persampahan di Kota Dumai hanya difokuskan pada wilayah pusat perkotaan saja. Dan ini juga belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh DTKPP Kota Dumai. Hal ini terlihat dari seluruh produksi sampah total di Kota Dumai yang telah diangkut DTKPP Kota Dumai pada tahun 2013 sebesar 130 m³/hari. Sampah yang mendominasi adalah sampah organik 61,95%, dan sampah an-organik yang meliputi kertas 12,26%, kaca 1,72%, plastik 13,39%, logam 1,80%, kain, 1,55%, karet 0,50%, dan sampah lain 6,83%.

Namun berdasarkan pemantauan penulis disetiap kelurahan yang ada terdapat 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) tumpukan sampah dengan volume pertumpukan rata- rata 0,8 m³/hari. Dari keterangan ini diketahui setiap kelurahan berpotensi menghasilkan sampah sebanyak 8,25 m³/hari. Jika di Kota Dumai ada 33 kelurahan, maka secara keseluruhan potensi sampah yang ada di Kota Dumai adalah 272, 25 m³/hari. Hal ini memperlihatkan bahwa DTKPP Kota Dumai belum melakukan pengelolaan sampah secara optimal karena selisih potensi sampah dan jumlah sampah yang berhasil di angkut mencapai 142, 25 m³/hari. Artinya, setiap harinya volume sampah yang tidak dapat terkendalikan oleh DTKPP Kota Dumai adalah sebanyak 142, 25 m³/hari. Lebih lanjut lagi, hal ini tentunya akan berdampak pada hasil retribusi daerah yang kemudian berdampak pada PAD.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jumlah sarana pengangkut sampah (kaiser) yang disediakan untuk masing- masing Kecamatan tidak sama jumlahnya. Hal ini didasarkan pada potensi sampah yang dihasilkan sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk dan tingginya aktifitas penduduk. Kecamatan yang memiliki Kaiser paling banyak adalah Dumai Kota dan Dumai Timur serta Dumai Selatan. Namun meskipun jumlah Kaiser 3 (tiga) Kecamatan ini lebih banyak dari kecamatan yang lain. Namun melihat luasnya area dan jumlah penduduk yang harus dilayani berkaitan dengan masalah sampah ini tentunya masih kurang memadai ditambah lagi masih ditemukan kaiser yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yan tentu saja dapat mengurangi produktifitas kerja dalam menangani masalah sampah ini.

Dan pada akhirnya pengelolaan sampah seperti yang diamanatkan dalam pelimpahan kewenangan ke kecamatan untuk pengambilan dan pengelolaan sampah diluar wilayah yang dilayani DTKKP dan pengangkutan sampah- sampah yang berada di Parit-parit jalan lingkungan ternyata tidak terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat masih belum memahami dengan baik tentang adanya pungutan yang disebut retribusi atas layanan yang diterimanya dari pemerintah dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan rumah tangga setiap harinya, sehingga masyarakat merasa enggan untuk melakukan kewajibannya membayar retribusi. Selain itu masyarakat juga menilai bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan masih belum optimal terlihat dari penumpukan sampah yang ada di beberapa titik ruas jalan maupun sampah yang memenuhi parit. Dari pihak Kecamatan sendiri menilai bahwa masih adanya ketidakjelasan dalam pemungutan ini karena selama ini yang melakukan pemungutan adalah DTKKP. Dan koordinasi dengan instansi terkait masih belum tuntas dibicarakan tentang mekanisme pemungutan dan pembagian wilayah kerja dengan tegas.

Seperti telah disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan pada pasal 4 bahwa salah bentuk kewenangan yang dimiliki Camat sesuai pelimpahan wewenang ini adalah bahwa Camat dapat melakukan penunjukan petugas pemungut retribusi Persampahan/ kebersihan untuk wilayah kerjanya. Sedangkan penarikan retribusi kebersihan dan persampahan untuk wilayah sekitar jalan protokol masih dipungut oleh DTKKP Kota Dumai. Untuk mengetahui perbandingan retribusi sampah sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KERANGKA TEORI

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata- kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2006). Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam. Menurut Lester dan Stewart bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan. sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Danim (2000) mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah: “Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan (Winarno, 2004) kenyataan. Menurut Anderson sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat

Dalam Studi Analisis Kebijakan Publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan, mengutip pendapat Hogwood dan Gunn selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan (*policy failur*) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena “Non implementation” (*tidak terimplementasi*), dan (2) karena “unsuccessful” (*implementasi yang tidak berhasil*).

Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan pendidikan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya : pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri itu memang jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (*bad luck*). Adapun telaah mengenai dampak atau

evalausi kebijakan adalah, dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada “implementasi kebijakan”. *program in meeting its objectives, or assesment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives*”.

Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “*policy impact / outcome* dan *policy output*. “*Policy Impact / outcome* ” adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan “*Policy output*” ialah dari apaapa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah (Islamy, 1986 : 114-115). Dari pengertian tersebut maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan terjadi yang di akibatkan oleh suatu implementasi kebijakan.

Menurut (Suharto, 2012) tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam meperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dari uraian tentang evaluasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teoritik siklus terakhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi, yang bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja Program/kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi sangatlah penting sebagai bentuk akuntabilitas public pemerintah atas kinerjanya. Namun melakukan evaluasi atas sebuah program/kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah/pembuat keputusan dengan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan tidaklah mudah. Sebagian karena kesulitan yang bersifat instrinctive (karena sifat dampak yang berdimensi luas dan dapat menyebar), juga karena beragam kebijakan juga menuntut beragam metode pengukuran yang sesuai; serta karena kurangnya usaha yang serius untuk itu. Untuk menghasilkan studi evaluasi yang benar-benar berguna, maka memahami criteria evaluasi yang harus dipenuhi, memahami metoda penelitian evaluasi, serta memilih metoda pengukuran yang tepat adalah syaratnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan survey (*field research*) seperti yang disebutkan oleh Sugiyono

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi/ gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012, sedangkan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan jawaban berupa data dengan format angka. metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari

Penelitian kuantitatif menurut (Arikunto, 2011) untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan data hasilnya. Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan antara satu dengan variabel lain.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kebijakan atau penelitian tindakan. Hal ini karena proses penelitian dilakukan pada analisis terhadap situasi dan masalah-masalah dalam evaluasi kebijakan. Hasilnya berupa data dan masukan (rekomendasi) untuk mendorong atau menolak sebuah kebijakan yang telah ada. Jika dilihat dari tingkat eksplanasinya maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif,

PEMBAHASAN

Data yang akan disajikan berikut merupakan data dari berbagai terknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Hasil dari penyajian data ini tidak bersifat baku, dimana penyajiannya seluruhnya sesuai dengan yang didapat di lapangan, melainkan penulis mencoba melakukan sedikit perubahan agar maksud yang hendak disampaikan dapat dipahami, namun tentu dengan tidak mengubah hasil akhir dari penelitian itu sendiri. Data yang disajikan dalam Bab ini selanjutnya akan menjadi bahan analisis penulis terhadap fenomena yang sedang diteliti yang akan diuraikan pada Bab selanjutnya, sekaligus menjadi bukti dari fakta fenomena itu sendiri.

Data deskriptif adalah menampilkan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner (tertutup) maupun tanggapan responden (terbuka). Berdasarkan hasil tanggapan dari 155 orang responden tentang variabel-variabel penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dalam deskriptif statistik.

Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian ujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Terdapat empat indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel efektifitas, yaitu dengan sub indikator: Waktu pelaksanaan pengumpulan sampah, Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan, Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia, Ketersediaan kapasitas TPS dibandingkan dengan kebutuhan ideal, dan Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai ditentukan oleh frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA atau waktu pelaksanaan pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke (1) tempat pembuangan sementara atau ke (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*).

Untuk Kecamatan Dumai Kota, Dumai Selatan dan Dumai Timur, pengangkutan sampah pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dilakukan secara tidak langsung (dengan menggunakan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS). Adapun sarana yang digunakan dalam proses pemindahan ini yaitu dengan menggunakan Kaisar. Frekuensi pengangkutan, sesuai dengan observasi yang dilakukan adalah hanya satu kali sehari setiap harinya. Jadwal operasi harus ditetapkan agar kegiatan pengangkutan sampah dapat berjalan lancar dan teratur, tanpa menimbulkan kemacetan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan serta dapat membantu dalam menetapkan jumlah tenaga kerja dan peralatan (alat angkut). Dengan adanya jadwal operasi, biaya operasi dapat diperkirakan sehingga dapat dilakukan efisiensi biaya dan waktu. Frekuensi pelayanan pun dapat diatur yang akan memudahkan petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya.

Pengaturan kerja yang dilakukan dalam kaitannya dengan jadwal operasi ini termasuk pengaturan penugasan, pengaturan kewajiban bagi para petugas untuk membersihkan kendaraan dan kewajiban para petugas untuk melaporkan hasil operasinya, sehingga volume sampah yang terangkut setiap pengangkutan dapat diketahui. Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis kepada Sopir Kaisar di Kecamatan Dumai Kota, yaitu Bapak Sanusi: “Saya hanya kerja satu hari sekali. Tanpa hari libur. Biasanya sih, saya mulai jalan itu jam 6 pagi keliling kelurahan.”

Keterangan tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan kepada pegawai Kelurahan Rimba Sekampung, yaitu Bapak Ramdhan menjelaskan: “Dikelurahan ini saya adalah pegawai yang mendapat pekerjaan tambahan untuk mengawasi kebersihan diwilayah kelurahan. Jadi, masalah waktu yang saudara tanyakan tadi, saya sudah mengintruksikan kepada Sopir Kaisarnya untuk secara rutin setiap pagi mengumpulkan sampah dari masyarakat. Nanti sampah tersebut akan di kumpulkan di TPS terdekat. Kalau untuk kita disini lebih sering memilih TPS yang di jalan Hasanuddin.” Penulis selanjutnya melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dari Keterangan Ibu Khadijah diketahui bahwa waktu pemungutan sampah rutin dilakukan setiap pagi. Berikut keterangannya: Demikianlah hasil wawancara penulis, tentang Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA atau waktu pengumpulan sampah terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai.

Efisiensi

Sebagaimana diketahui bahwa efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan". Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber -sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan." Efisiensi seringkali dikaitkan dengan Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama - sama menilai variabel input terhadap output. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan sudah cukup baik, karena sosialisasi serta tanggapan dari masyarakat yang positif terhadap pelimpahan kewenangan tersebut cukup membantu dalam peningkatan kebersihan pemukiman penduduk.

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan ini dapat dilihat dengan tolak ukur: Ketersediaan pegawai yang kompeten berkaitan dengan masalah persampahan dan kebersihan, Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/ kebersihan, Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap kecamatan, Pemungutan retribusi dilakukan secara rutin, dan Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Untuk mengukur seberapa besar kemampuan pegawai yang di beri tanggungjawab di setiap Kelurahan untuk mengelola masalah kebersihan dan persampahan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan Kelurahan dapat di pandang dari jenjang pendidikan, karena latar belakang ini memiliki dampak yang sangat penting. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, bahwa pada dasarnya pendidikan dan pelatihan proses yang berlanjut bukan proses sesaat. Peran pendidikan dan pelatihan sangat besar peranannya untuk membekali pegawai agar lebih kreatif dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Budi Hasnul selaku Camat Dumai Kota tentang hal ini beliau menegaskan: "Di setiap Kantor Camat di Kota Dumai ini, memang belum ada seksi khusus yang di peruntukkan untuk menangani masalah ini. Sesuai dengan adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/ kebersihan. Anggaran untuk pelayanan persampahan/ kebersihan sudah di anggarkan oleh masing- masing Kecamatan dalam rencana anggaran yang diajukan secara rutin ke pemerintah Kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggapan Responden terhadap Indikator Efektifitas diperoleh total skor 21312 yang diakumulasikan dari jawaban seluruh sub indikator yaitu Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan skor 469, Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan dengan skor 494, Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia dengan skor 443, Ketersediaan kapasitas TPS dibandingkan dengan kebutuhan ideal dengan skor 469 dan Jumlah timbunan sampah dengan skor 437. Total Skor 2312 Pada garis kuartil berada pada posisi Cukup Baik dengan persentase 59,66%.

2. Tanggapan Responden terhadap Indikator *Efisiensi* diperoleh total skor 2300 yang diakumulasikan dari jawaban seluruh sub indikator yaitu Ketersediaan pegawai yang kompeten berkaitan dengan masalah persampahan dan kebersihan dengan skor 454, Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/ kebersihan dengan skor 430, Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap kecamatan dengan skor 462, Pemungutan retribusi dilakukan secara rutin dengan skor 476, dan Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R dengan skor 478. Total Skor 2300 Pada garis kuartil berada pada posisi Cukup Baik dengan persentase 59,35%.
3. Tanggapan Responden terhadap Indikator *Kecukupan* diperoleh total skor 2037 yang diakumulasikan dari jawaban seluruh sub indikator yaitu Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor.24 tahun 2012 dengan skor 507, Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian wewenang dengan skor 501, Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya dengan skor 510, Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat dengan skor 519. Total Skor 2037 pada garis kuartil berada pada posisi Baik dengan persentase 65,71%.
4. Tanggapan Responden terhadap Indikator *Pemerataan* diperoleh total skor 1808 yang diakumulasikan dari jawaban seluruh sub indikator yaitu Pelayanan persampahan/kebersihan diterima oleh setiap masyarakat dengan skor 476, Beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan skor 435, Pemungutan retribusi dilakukan secara merata disetiap kecamatan dengan skor 407, Kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan Kota dengan skor 490. Total Skor 1808 pada garis kuartil berada pada posisi Cukup Baik dengan persentase 58,32%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta: 2006.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, M. D. W., Ayu, A., & Purwati, M. L. H. (2021). Effect of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.

- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manik, K. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy (Pengantar Teori & Analisis Kebijakan*. (Jakatra: Kencana.
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.
- Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 6(2), 27-38.
- Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. *Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi*, 171.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 5(1), 43-56.
- Said Zainal Abidin. 2002. *Kebijakan Publik edisi Revisi*. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2004. *Statistika untuk Penelitian, Cetakan Keenam*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:
- Wahab, Solichin A. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke. Implementaasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). *Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ>(Halim et al., n.d.)
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *MEDIUM*, 6(1), 78-86.
- Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
- Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 19-36.
- Zainal, F. N. P. (2021, December). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District. In *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE* (Vol. 9, p. 169).
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).